

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat melalui website Kemenkeu, BPS, dan Kemendagri. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan dalam bab tiga, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Sampel
Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Indonesia (2016-2017)	1.016
Pemerintah kabupaten/kota yang mempublikasikan dan mengaudit realisasi APBD, data pertumbuhan ekonomi dan data luas wilayah secara tidak lengkap (2016-2017)	(50)
Jumlah data sampel yang dipakai dan akan diolah	966
Data outlier	401
Jumlah data sampel yang dapat diolah	565

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder, 2019

B. Uji Kualitas Instrumen Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini seluruh variabel penelitian yang berupa variabel dependen, independen serta moderasi menggunakan skala logaritma untuk membulatkan nilai nominal yang terlalu besar. Uji analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai jumlah data dalam penelitian, nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standart deviation*. Hasil uji statistik deskriptif secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Log_Belanja modal	565	11,05	12,49	11,4442	,15323
Log_Pajak daerah	565	8,57	13,16	10,3464	,57981
Log_Retribusi daerah	565	8,10	11,12	9,8461	,50374
Log_DAK	565	10,78	12,85	11,2897	,20706
Log_Luas wilayah	565	1,21	4,55	3,1776	,64817
Log_Pertumbuhan ekonomi	565	-1,10	1,05	,7223	,14625
Valid N (listwise)	565				

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 15.0

Tabel 4.2 menggambarkan statistik deskriptif pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel diatas menunjukkan terdapat 565 jumlah data yang digunakan dalam penelitian. Dalam kurun waktu dua tahun variabel dependen (Log_belanja modal) memperoleh nilai

standar deviasi sebesar 0,15323 dan rata-rata sebesar 11,4442 atau senilai dengan 22%. Nilai rata-rata belanja modal sebesar $22\% < 29\%$ menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal dalam total belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia masih tergolong rendah. Daerah yang memiliki belanja modal paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritma belanja modal sebesar 12,49 atau Rp. 3.090.055.683.753 sedangkan daerah yang memiliki belanja modal paling rendah terdapat pada Kabupaten Banggai Laut tahun 2016 dengan nilai logaritma belanja modal sebesar 11,05 atau Rp. 112.449.756.310.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log_pajak daerah) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,57981, dan rata-rata sebesar 10,3464. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah dalam total pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Indonesia sebesar 10,3464. Daerah yang memiliki pajak daerah paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritma pajak daerah sebesar 13,16 atau Rp. 14.350.601.626.319 sedangkan daerah yang memiliki pajak daerah paling rendah terdapat pada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, dengan nilai logaritma pajak daerah 8,57 atau Rp. 368.138.060.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log_retribusi daerah) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,50374, dan rata-rata sebesar 9,8461. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi retribusi

daerah dalam total pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Indonesia sebesar 9,8461. Daerah yang memiliki retribusi daerah paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritma retribusi daerah sebesar 11,12 atau Rp. 131.444.291.907, sedangkan daerah yang memiliki retribusi daerah paling rendah terdapat pada Kabupaten Waropen tahun 2016 dengan nilai logaritma retribusi daerah sebesar 8,10 atau Rp. 124.784.000.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log_dana alokasi khusus) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0, 20706, dan rata-rata sebesar 11,2897. Nilai rata-rata sebesar 11,2897 menunjukkan bahwa rata-rata terbesar dalam penelitian ini terdapat pada variabel dana alokasi khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan daerah pada pemerintah pusat masih tinggi. Daerah yang memiliki dana alokasi khusus paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017 dengan nilai logaritama dana alokasi khusus sebesar 12,85 atau Rp. 7.056.095.687.317, sedangkan daerah yang memiliki dana alokasi khusus paling rendah terdapat pada Kabupaten Teluk Wondama tahun 2017 dengan nilai logaritma dana alokasi khusus sebesar 10,78 atau Rp. 60.156.861.789.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel independen (Log_luas wilayah) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,64817 dan rata-rata sebesar 3,1776. Rata-rata logaritma luas wilayah sebesar 3,1776, mengartikan bahwa rata-rata luas wilayah setiap kabupaten/kota di Indonesia mencapai 3.455,4200 Km². Daerah yang memiliki luas wilayah

paling tinggi terdapat pada Kabupaten Kutai Barat dengan nilai logaritma luas wilayah sebesar 4,55 atau 35.696,59 Km², sedangkan daerah yang memiliki luas wilayah paling rendah terdapat pada Kota Magelang dengan nilai logaritma luas wilayah sebesar 1,21 atau 16,06.

Dalam kurun waktu dua tahun variabel moderasi (Log_pertumbuhan ekonomi) memperoleh nilai standar deviasi sebesar 0,14625, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 0,7223 (72,23%). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai kabupaten/kota di Indonesia sebesar 72,23%. Nilai maksimum 1,05 terdapat pada Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 dan nilai minimum -1,10 terdapat pada Kabupaten Indramayu tahun 2016.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan wajib pada analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu data diuji dengan uji asumsi klasik agar menghasilkan model regresi yang tidak bias, karena tidak semua data regresi dapat diolah. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan pada penelitian berdistribusi secara normal dan terbebas dari gejala autokorelasi, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas.

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dari data yang digunakan dalam penelitian:

a. Uji Normalitas

Tabel 4. 3
Uji Normalitas data Model 1

<i>one-sample Kolmogorov Smirnov test</i>	<i>Asym. Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
<i>Unstandardized residual</i>	0,281	Residual berdistribusi normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi (variabel dependen dan independen) di dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *one-sample Kolmogorov Smirnow test* (K-S) dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*, yang mana residual data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Hasil pengujian normalitas pada model 1 menunjukkan hasil sebesar 0,281, yang artinya nilai signifikansi $0,281 > 0,05$, sehingga dapat dikatakan residual data untuk model 1 berdistribusi normal.

Tabel 4. 4
Uji Normalitas data Model 2

<i>one-sample Kolmogorov Smirnov test</i>	<i>Asym. Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
<i>Unstandardized residual</i>	0,262	Residual berdistribusi normal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil pengujian normalitas pada model 2 menunjukkan hasil sebesar 0,262. Artinya nilai signifikansi $0,262 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data untuk model 2 berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5
Uji Autokorelasi Model 1

<i>Runs test</i>	Asym. Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized residual</i>	0,101	Terbebas Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Uji autokorelasi bertujuan untuk membuktikan apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antara tahun t dengan dengan tahun sebelumnya ($t-1$). Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu, dengan uji *Durbin-Watson* dan uji *Runs Test*, apabila terjadi masalah autokorelasi pada uji *Durbin-Watson*, maka cara lain untuk melakukan uji autokorelasi yaitu menggunakan uji *Runs Test*. Uji ini merupakan bagian dari statistik *non-parametric* yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi, jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual menyebar secara acak atau random.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai *Asymp. Sig (2-tailed)*, Apabila nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (5%), maka dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018). Hasil uji *Runs Test* pada model 1

menunjukkan hasil sebesar $0,101 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan residual data untuk model 1 terbebas dari autokorelasi.

Tabel 4. 6
Uji Autokorelasi Model 2

<i>Runs test</i>	Asym. Sig (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized residual</i>	0,070	Terbebas Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji *Runs Test* pada model 2 menunjukkan hasil sebesar 0,070. Artinya nilai signifikansi $0,070 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data untuk model 2 terbebas dari masalah autokorelasi.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 7
Uji Multikolinearitas Model 1

Variabel	<i>Collenearity Statistics</i>		Kesimpulan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Log_Pajak daerah	,420	2,381	Terbebas Multikolinearitas
Log_Retribusi daerah	,479	2,087	Terbebas Multikolinearitas
Log_Dana alokasi khusus	,611	1,637	Terbebas Multikolinearitas
Log_Luas Wilayah	,734	1,363	Terbebas Multikolinearitas
Log_Pertumbuhan ekonomi	,977	1,023	Terbebas Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari *collenearity statistics*, jika nilai VIF

< 10 atau nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi masalah multikolinieritas (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Hasil uji multikolinieritas pada model 1 menghasilkan nilai tolerance seluruh variabel $> 0,10$, yaitu sebesar 0,420, 0,479, 0,611, 0,734, 0,977, begitu pula dengan nilai VIF seluruh variabel model 1 memiliki nilai VIF < 10 , yaitu sebesar sebesar 2,381, 2,087, 1,637, 1,363, 1,023, sehingga dapat dikatakan model regresi pada model 1 terbebas dari masalah multikolinieritas.

Tabel 4. 8
Uji Multikolinieritas Model 2

Variabel	Collenearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Log_Pajak daerah	,019	52,500	Terjadi multikolinieritas
Log_Retribusi daerah	,022	44,613	Terjadi multikolinieritas
Log_Dana alokasi khusus	,610	1,639	Terbebas Multikolinieritas
Log_Luas Wilayah	,731	1,368	Terbebas Multikolinieritas
Log_PD*PE	,001	731,814	Terjadi multikolinieritas
Log_RD*PE	,001	744,750	Terjadi multikolinieritas

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji multikolinieritas pada model 2 beberapa variabel independen seperti pajak daerah, retribusi daerah dan variabel moderasi seperti interaksi dari pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan interaksi retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi mengandung masalah multikolinieritas karena memiliki nilai tolerance $< 0,01$ dan nilai VIF > 10 .

Gujarati dan Porter (2013) masalah multikolinieritas dapat diatasi dengan dua pilihan yaitu diantaranya, yang pertama tidak melakukan apapun dikarenakan multikolinieritas adalah kehendak Tuhan dan bukan suatu masalah teknik statistika pada umumnya dan yang kedua mengikuti beberapa aturan yang baku, seperti menggabungkan data *cross-section* dan data *time series*, mengeluarkan salah satu atau lebih variabel independen yang memiliki korelasi tinggi, mentransformasikan data dalam bentuk logaritma natural atau *first difference*.

Paradigma Gujarati dan Porter (2013) sejalan dengan Hartman dan Moers (1999) dalam Hartono (2016) yang menyatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi karena koefisien dari interaksi variabel independen dan variabel moderasi ditransformasikan untuk ditengahkan berdasarkan nilai rata-ratanya, sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah ketika diterapkan dalam analisis regresi moderasi. Pada penelitian ini gejala multikolinieritas akan diabaikan saja, karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang sudah di transformasikan dalam bentuk logaritma.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 9
Uji Heteroskedastisitas Model 1

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Log_Pajak daerah	,643	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Retribusi daerah	,953	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Dana alokasi khusus	,273	Terbebas Heteroskedastisitas

Log_Luas Wilayah	,128	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Pertumbuhan ekonomi	,998	Terbebas Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *coefficients^a* dengan nilai absolut residual (Abs_Res) sebagai variabel dependennnya.

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji gletser dengan tingkat signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada model 1 menghasilkan nilai sig untuk seluruh variabel $> 0,05$, yaitu sebesar 0,643, 0,953, 0,273, 0,128, 0,998, sehingga dapat disimpulkan uji heteroskedastisitas pada model 1 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. 10
Uji Heteroskedastisitas Model 2

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Log_Pajak daerah	,945	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Retribusi daerah	,978	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Dana alokasi khusus	,249	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_Luas Wilayah	,057	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_PD*PE	,988	Terbebas Heteroskedastisitas
Log_RD*PE	,984	Terbebas Heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji heteroskedastisitas pada model 2 menunjukkan nilai sig untuk seluruh variabel $> 0,05$, yaitu berturut-turut sebesar 0,945, 0,978, 0,249, 0,057, 0,988, 0,984, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 2 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

1. Uji Signifikansi secara Simultan (Uji f)

Tabel 4. 11
Hasil Uji F Model 1 dan 2

Persamaan	Sum of Squires	df	Mean Square	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	11,004	5	2,201	549,552	,000 ^a
<i>Residual</i>	2,239	559	,004		
<i>Total</i>	13,242	564			
2 <i>Regression</i>	11,025	6	1,838	462,532	,000 ^a
<i>Residual</i>	2,217	558	,004		
<i>Total</i>	13,242	564			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig $< 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Hasil uji F pada model 1 dan 2 menghasilkan nilai signifikansi yang sama yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah pada model 1 serta pajak daerah yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi, dan retribusi daerah yang dimoderasi dengan

pertumbuhan ekonomi pada model 2 berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

2. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4. 12
Hasil Koefisien Determinasi Model 1

<i>Model summary^b</i>	
Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	,829

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kuat variabel independen menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2019). Hasil uji koefisien determinasi pada model 1 menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,829, yang berarti bahwa, belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 82,9 %, sedangkan sisanya 27,1% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4. 13
Hasil Koefisien Determinasi Model 2

<i>Model summary^b</i>	
Model	<i>Adjusted R Square</i>
2	,831

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Hasil uji koefisien determinasi pada model 2 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,831, yang berarti belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, luas wilayah, serta pajak daerah yang dimoderasi dengan pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah yang dimoderasi dengan

pertumbuhan ekonomi sebesar 83,1%, sedangkan sisanya 26,9% dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada model 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa nilai *Adjusted R Square* model ke-2 lebih baik digunakan dalam menilai besarnya pengaruh independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan signifikansi nilai 0,05 ($\alpha=5\%$). Suatu hipotesis akan terdukung apabila nilai sig < α dan koefisien regresi searah dengan hipotesis (Nazaruddin dan Basuki, 2019).

Tabel 4. 14
Hasil Uji Hipotesis Model 1 dan 2

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Sig.
	B	
1 (constant)	5,166	,000
Log_Pajak daerah	,103	,000
Log_Retribusi daerah	-,006	,431
Log_Dana alokasi khusus	,465	,000
Log_Luas Wilayah	,038	,000
Log_Pertumbuhan ekonomi	-,138	,000
2 (constant)	5,086	,000
Log_Pajak daerah	,028	,396
Log_Retribusi daerah	,083	,018
Log_Dana alokasi khusus	,463	,000
Log_Luas Wilayah	,039	,000
Log_PD*PE	,105	,021
Log_RD*PE	-,125	,009

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 15.0

Berdasarkan tabel 4. 13 diperoleh persamaan regresi untuk model 1 dan 2 adalah, sebagai berikut:

$$BM = 5,166 + 3,519 PD - 0,006 RD + 0,465 DAK + 0,038 LW - 138 PE + e$$

$$BM = 5,086 + 0,028 PD + 0,083 RD + 0,463 DAK + 0,039 LW + 0,105 PD*PE - 0,125 RD*PE$$

Berikut akan dijelaskan mengenai hasil pengujian hipotesis pada tabel 4. 13:

1) Pengujian Hipotesis 1 (H₁)

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan variabel pajak daerah (Log_pajak daerah) memiliki nilai koefisien regresi 0,103 dan nilai sig. 0,000 < alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terdukung.

2) Pengujian Hipotesis 2 (H₂)

Hipotesis kedua menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan variabel retribusi daerah (Log_retribusi daerah) memiliki nilai koefisien regresi -0,006 dan nilai sig. 0,431 > alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak terdukung karena nilai koefisien regresi tidak searah dengan hipotesis dan nilai signifikansi > alpha 0,05.

3) Pengujian Hipotesis 3 (H_3)

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan variabel dana alokasi khusus (Log_dana alokasi khusus) memiliki nilai koefisien regresi 0,465 dan nilai sig. $0,000 < \alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga terdukung.

4) Pengujian Hipotesis 4 (H_4)

Hipotesis keempat menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan variabel luas wilayah (Log_pajak daerah) memiliki nilai koefisien regresi 0,038 dan nilai sig. $0,000 < \alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat terdukung.

5) Pengujian Hipotesis 5 (H_5)

Hipotesis kelima menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan variabel interaksi pertumbuhan ekonomi dengan pajak daerah (Log_PE*PD) memiliki nilai koefisien regresi 0,105 dan nilai sig. $0,021 < \alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima terdukung.

6) Pengujian Hipotesis 6 (H_6)

Hipotesis keenam menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan variabel interaksi pertumbuhan ekonomi dengan retribusi daerah (Log_PE*RD) memiliki nilai koefisien regresi -0,125 dan nilai sig. $0,009 < \alpha 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima tidak terdukung karena koefisien regresi tidak searah dengan hipotesis.

Kesimpulan untuk hasil pengujian hipotesis pertama sampai keenam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 15
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Hasil
H_1	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal	Terdukung
H_2	Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal	Tidak Terdukung
H_3	Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal	Terdukung
H_4	Luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal	Terdukung
H_5	Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal	Terdukung
H_6	Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal	Tidak Terdukung

D. Pembahasan (Interpretasi)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus, dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi, pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2016 sampai 2017.

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel pajak daerah, dana alokasi khusus dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (H_1). Hasil pengujian hipotesis untuk variabel pajak daerah menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,103, sehingga (H_1) terdukung. Pajak daerah adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendanaan utama untuk pemerintah daerah. Meskipun setiap daerah mempunyai potensi penerimaan pajak daerah yang tidak sama, akan tetapi pada penelitian ini dengan sampel yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena pajak daerah merupakan alternatif yang

paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif satabil, sebagai contoh untuk pajak bumi dan bangunan pasti wajib pajak yang bersangkutan setiap tahunnya dibebankan pajak bumi dan bangunan untuk setiap aset yang dimiliki. Selain itu pajak daerah pembayarannya wajib dan memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan membuat masyarakat sadar dan peduli untuk melaksanakan kewajiban kenegaraannya.

Semakin tinggi penerimaan pajak daerah akan mengakibatkan alokasi belanja modal semakin tinggi. Dibuktikan dengan hasil analisis statistik deskriptif, yang menunjukkan nilai maksimum pajak daerah terdapat pada kabupaten Bangkalan tahun 2017 dan nilai maksimum belanja modal terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017. Berdasarkan dalam Undang- Undang No. 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah digunakan untuk keperluan bagi kemakmuran rakyat dan pajak daerah digunakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional dengan cara mengalokasikan pajak tersebut ke belanja modal. Suparmoko (2002) juga menyatakan bahwa penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang di realisasikan dalam belanja modal. Anggaran belanja modal digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi sarana dan prasarana umum daerah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan tujuan teori *stewardship* bahwa *steward* berusaha melayani

masyarakat agar terpenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya pajak daerah itu adalah penerimaan yang bersumber dari masyarakat dan salah satu potensi yang dimiliki daerah, jadi masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pajak daerah harus terus digali demi terciptanya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Tjahjono (2018) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sudika dan Budiarta (2017), Nugraha dan Dwirandra (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta Lestari (2015) pada pemerintahan kota di Jawa Barat, yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota sudah baik dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (H_2). Hasil pengujian hipotesis untuk variabel retribusi daerah menunjukkan nilai $\text{sig } 0,431 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $-0,006$, sehingga (H_2) tidak terdukung. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena pelayanan retribusi daerah setiap kabupaten/kota di Indonesia berbeda-beda karena sumber daya alam yang dimiliki daerah satu dengan daerah yang lainnya juga berbeda, selain itu penetapan tarif retribusi daerah juga

ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi besar kecilnya tingkat penerimaan retribusi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa tidak semua pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia memaksimalkan pelayanan atas retribusi daerahnya sehingga menyebabkan penerimaan retribusi daerah yang rendah. Dibuktikan dengan nilai tertinggi retribusi daerah hanya sebesar Rp. 131.444.291.907 sedangkan pajak daerah mencapai Rp. 14.350.601.626.319, jadi semakin rendah tingkat penerimaan retribusi daerah, maka pengalokasian belanja modal juga akan semakin rendah (menurun), yang pada akhirnya penerimaan retribusi daerah tidak menjadi sumber pendanaan utama dalam pengalokasian belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia.

Berbeda dengan pajak daerah, titik tekan pada retribusi daerah adalah adanya imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan retribusi daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masih adanya ketidakcocokkan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan yang diterima, oleh karena itu masyarakat tidak mau membayar lebih tinggi apabila pelayanan yang diterima kualitasnya masih buruk, selain itu hal tersebut juga akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah,

sehingga akan mengakibatkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa pelayanan retribusi daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Handayani *et al.* (2015) pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Mamonto *et al.* (2014) pada Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Sudika dan Budiarta (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Handayani *et al.* (2015) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal karena adanya anggapan bahwa, masyarakat memandang retribusi daerah sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah sehingga masyarakat akan membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.

Sudika dan Budiarta (2017) juga menyatakan bahwa, alasan retribusi daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dikarenakan pengelolaan sumber-sumber atas pendapatan retribusi daerah belum dikelola dengan baik sehingga kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah proporsinya masih rendah. Walaupun Pulau Bali terkenal dengan pariwisatanya sehingga banyak wisatawan yang datang ke Pulau Bali dan tentunya akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pada retribusi pariwisata, akan tetapi hal tersebut tidak mampu meningkatkan penerimaan pada pendapatan retribusi daerah, dikarenakan pengelolaan yang disediakan pemerintah daerah di Pulau Bali tidak dimaksimalkan dan tidak sejalan dengan pengelolaan yang dapat meningkatkan proporsi pendapatan retribusi daerah. Dalam hal ini maju

atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan daerahnya dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (H_3). Hasil pengujian hipotesis untuk variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $0,465$, sehingga (H_3) terdukung. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus adalah dana yang ditujukan untuk membiayai kegiatan khusus pada suatu daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut mengarah pada sebuah kegiatan investasi, seperti perbaikan sarana dan prasarana publik dengan umur ekonomis yang panjang.

Dana alokasi khusus merupakan dana yang sangat penting, karena seiring berjalannya waktu berbagai program investasi pembangunan harus dipenuhi, maka peran DAK semakin meningkat. Jadi semakin besar dana alokasi khusus yang diterima, maka alokasi belanja modal juga akan semakin besar. Dibuktikan dengan hasil analisis statistik deskriptif, yang menunjukkan nilai maksimum dana alokasi khusus terdapat pada kabupaten Bangkalan tahun 2017 dan nilai maksimum belanja modal terdapat pada Kabupaten Bangkalan tahun 2017.

Dana alokasi khusus merupakan dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah

untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan professional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum mencapai standar dalam pembangunan daerah (Hairiyah, 2017). Pada dasarnya DAK merupakan dana yang bersifat *special grant*, peruntukannya digunakan sebagai pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dari pusat, sehingga realisasi DAK merupakan realisasi belanja modal. Penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah pusat telah memenuhi syarat minimal sekurang-kurangnya 10% pengalokasin DAK yang diperuntukkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menggunakan DAK tersebut untuk membiayai program dan kegiatan dengan benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peran *steward* dalam melayani kebutuhan *principals* sudah tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hairiyah (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Pratama (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Riau, Juniawan dan Suryantini (2018) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan Rachmawati (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang

menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah luas wilayah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal (H_4). Hasil pengujian hipotesis untuk variabel luas wilayah menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,038, sehingga (H_4) terdukung. Variabel luas wilayah dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dimana luas wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki luas wilayah yang tidak sama, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pun berbeda, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa, daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas, akan mengakibatkan belanja modalnya lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, wilayah yang luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih ditingkatkan agar tersedianya pelayanan publik yang baik dan tidak terjadi ketimpangan sosial antara daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas dengan daerah yang memiliki wilayah yang kecil (Meianto *et al.* 2014) sebagai contoh untuk daerah yang memiliki wilayah yang lebih luas tentunya akan membutuhkan pembangunan jalan raya yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki luas wilayah yang kecil. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori

stewardship, dimana pemerintah dipercaya untuk melayani kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang memadai.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang menggambarkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana. Terlebih juga untuk Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran wilayah tentunya berupaya memberikan fasilitas pelayanan publik yang memadai terutama pada bangunan rumah sakit, gedung sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, jalan raya, jembatan, pasar dan lain-lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Putra (2017) pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Wibisono dan Wildaniati (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Sholikah dan Wahyudin (2014) pada kabupaten/kota di Pulau Jawa, serta Meianto *et al.* (2014) pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan, yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

5. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal (H_5). Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig $0,021 < 0,05$ dan

nilai koefisien sebesar 0,105, sehingga (H_5) terdukung. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai peran penting dalam pengaruh peningkatan pajak daerah terhadap alokasi belanja modal. Didukung dengan teori *fiscal federalism* yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara desentralisasi fiskal seperti halnya pajak daerah dengan kondisi perekonomian, serta berbagai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Sari dan Supadmi, 2016).

Hal tersebut dikarenakan, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, artinya pertumbuhan ekonomi menggambarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mengimplikasikan tingginya pendapatan yang didapat masyarakat, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat, sehingga hal tersebut akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah daerah (Jaeni dan Anggana, 2016).

Pada pemerintah kabupaten/kota dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pembangunan infrastruktur industri seperti hotel, restoran, perumahan dan lain-lainnya akan semakin besar hal tersebut juga akan menambah penerimaan pajak daerah semakin tinggi karena untuk bangunan hotel dan restoran sudah ditetapkan sebagai pembayaran pajak daerah untuk kabupaten/kota (UU No. 28 Tahun 2009) dan dibebankan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata mampu meningkatkan para investor untuk

berinvestasi di daerah (Jaeni dan Anggana, 2016), karena para investor tidak akan khawatir untuk berinvestasi pada daerah yang pertumbuhan ekonominya sudah baik dengan berbagai kemudahan akses seperti regulasi ataupun fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Jadi semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Indonesia, akan mengakibatkan naiknya pendapatan pajak daerah sehingga alokasi belanja modal juga akan semakin tinggi. Pada dasarnya pajak daerah itu adalah penerimaan yang bersumber dari masyarakat dan salah satu potensi yang dimiliki daerah, jadi masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan, yang direalisasikan dalam bentuk belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dwirandra (2016) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal.

6. Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis keenam pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal (H_6). Hasil pengujian hipotesis untuk variabel interaksi retribusi daerah dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig $0,009 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $-0,125$, sehingga (H_6) tidak terdukung. Sebelumnya sudah dilakukan uji hipotesis untuk variabel retribusi daerah,

hasil menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Setelah dilakukan uji kembali dengan menggunakan variabel moderasi, hasil tetap menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu memperkuat pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal, hal ini diduga karena pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pengelolaan retribusi daerah, dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak menjamin tingginya penerimaan retribusi daerah jika pengelolaan retribusi daerah tidak ditingkatkan, karena pada dasarnya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin/jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan pada penurunan hipotesis, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, artinya pertumbuhan ekonomi menggambarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan mengimplikasikan tingginya pendapatan yang didapat masyarakat, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat semakin meningkat, jadi semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan semakin banyak kepentingan yang dibutuhkan orang pribadi/badan atas pelayanan retribusi daerah, seperti berpariwisata,

penggunaan jasa olahraga, penginapan villa, perizinan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, karena pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa diimbangi dengan maksimalisasi atas pelayanan retribusi daerah akan menghasilkan penerimaan retribusi daerah yang tetap rendah. Masyarakat tentunya tidak akan menggunakan jasa retribusi daerah apabila pelayanan yang diberikan pemerintah masih buruk dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat walaupun tingkat konsumsi dan produktivitas meningkat.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal karena pelayanan dan pengelolaan atas retribusi daerah tidak dimaksimalkan.